

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2019 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan isu-isu strategis pembangunan. Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 diarahkan untuk memantapkan upaya pengentasan kemiskinan melalui harmonisasi pembangunan berkelanjutan.

Untuk mendukung upaya tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dititikberatkan pada :

1. Kemiskinan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan prioritas pada :
 - a. Peningkatan kualitas data sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui upaya perbaikan basis data terpadu.
 - b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi serta pangan dan gizi yang difokuskan pada desa/kecamatan miskin dengan sasaran berdasarkan basis data terpadu.
 - c. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui pelatihan ketrampilan bagi rumah tangga miskin desil 3 dan 4 dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal.
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sehingga terwujud pembangunan yang inklusif melalui upaya pelibatan semua komponen termasuk masyarakat dan dunia usaha, dengan fokus di desa/kecamatan miskin.
2. Daya Saing Ekonomi
 - a. Revitalisasi pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada peningkatan hasil, pengolahan pasca produksi untuk nilai

tambah, peningkatan kesejahteraan petani serta keamanan pangan.

- b. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal berbasis kerakyatan di sektor riil dalam bentuk klaster, OVOP/ODOP dan industri prioritas.
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk dari hulu ke hilir.
- d. Pengembangan jaringan pemasaran yang efektif dan efisien.
- e. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas yang mendukung aktifitas perekonomian.
- f. Pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis pada desa wisata didukung oleh ekonomi kreatif.
- g. Perbaikan iklim investasi yang kondusif melalui insentif dan kemudahan perijinan.

3. Tata Kelola Pemerintahan

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b. Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi yang efektif dan efisien.
- d. Penguatan sistem informasi manajemen pemerintah yang berprinsip pada transparansi dan keterbukaan informasi publik.
- e. Penguatan upaya pemberantasan praktek KKN di lingkungan birokrasi melalui penciptaan dan pengembangan zona integritas.
- f. Peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis efisiensi yang transparan dan akuntabel.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter.

- b. Kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan biaya pendidikan terutama bagi masyarakat miskin.
- c. Pengembangan layanan pendidikan inklusi.
- d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan dasar di daerah perbatasan kabupaten dalam rangka pemerataan akses serta mutu pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sekolah ramah anak.
- e. Peningkatan upaya kesehatan lingkungan berbasis masyarakat.
- f. Peningkatan dan keberpihakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- g. Penanganan kasus gizi masyarakat secara lebih komprehensif sesuai kebutuhan.
- h. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui aksi nyata dalam mendukung gerakan masyarakat sehat (Germas).
- i. Penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui upaya preventif, promotif dan kuratif serta pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi.
- j. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai standar bursa kerja.
- k. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pelatihan.

5. Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan layanan dan pengelolaan persampahan (fokus pada TPA dan TPST).
- b. Peningkatan upaya konservasi lingkungan hidup dengan pelibatan masyarakat dan swasta.
- c. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- d. Pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan bencana (pencegahan, penanggulangan, pengurangan dampak bencana dan pasca bencana).
- e. Peningkatan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat.
- f. Percepatan penanganan kawasan kumuh.

- g. Pengurangan pencemaran lingkungan.
- h. Pelestarian sumber-sumber air berbasis kearifan lokal

6. Kesenjangan Wilayah

- a. Pemerataan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur.
- b. Mendorong pusat-pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan kemudahan layanan barang dan jasa

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga

memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Secara umum, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan tahun 2019 tersebut, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dibagi menurut prioritas dan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 seperti yang dirumuskan pada Lampiran I.